



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**UNIT KERJA** : KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARIJONO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 759939

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.418.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/42 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/65 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 260 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 143.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/190 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 123.500.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.700.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 11.303.966**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.558.503.966



III. HUTANG

Rp. 90.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.468.503.966

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.